PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Sabtu Tanggal: 04 Maret 2017 Halaman: 13

Penataan Belum Sentuh Perumahan

KOMUNITAS Pemerti Code berharap penataan kawasan kumuh sudah mulai menyasar pada kawasan perumahan. Selain sebagai solusi untuk mengurangi kawasan kumuh, dengan menyentuh kawasan perumahan akan mengurangi dampak banjir.

"Memang seharusnya penataan kawasan kumuh harus menyentuh kawasan permukiman. Sejauh ini, perencanaan penataan kawasan kumuh yang diusulkan kelurahan belum menempatkan perumahan sebagai objek kegiatan," kata Ketua Pemerti Code, Totok Pratopo, kemarin.

Penataan Belum

● Sambungan **Hal 13**

Salah satu solusi dengan menyentuh perumahan, adalah dengan membangun rumah susun (rusun). Hanya saja, hingga kini Totok menyebut pemerintah di Kota Yogya mengalami kendala terkait lahan yang bisa dimanfaatkan.

"Kendala tersebut sehatusnya tidak dijadikan sebagai hambatan. Salah satunya adalah dengan konsep konsolidasi lahan milik warga yang sudah bersertifikat," ujarnya.

Sebagai contoh, pihaknya dengan pihak swasta tengah merumuskan konsep konsolidasi lahan di Kampung Jetisharjo pinggiran Sungai Code. Di kawasan tersebut, terdapat delapan hingga sepuluh rumah yang siap dikonsolidasikan. Nantinya akan dibangun rumah vertikal dan bisa dimanfaatkan bersama-sama.

Totok menjelaskan, warga di sekitar bantaran sungai mendapat ancaman setiap musim penghujan tiba. Hal ini sudah terjadi pada tahun 2011 sejak banjir lahar dingin dari Gunung Merapi. Sementara itu, berdasarkan pemetaan ada delapan kecamatan di sepanjang Sungai code yang masuk garis merah atau kerawanannya tinggi. Kawasan itu pun termasuk wilayah kumuh berdasarkan SK Wali Kota No 393/2011.

"Melihat berbagai fakta itu, maka kami terus mengusulkan agar perumahan turut menjadi sasaran penataan. Terutama dengan mempedomani konsep Mundur, Munggah, Madep Kali (M3K) yang sudah digaungkan oleh Pemda DIY. Tapi konsep M3K itu juga masih perlu penegasan. Khususnya menyangkut mundurnya seberapa dan munggahnya bagaimana," tegasnya. **(ais)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan 2. Dinas PUPKP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005